

**ANALISIS IMPLEMENTASI DESENTRALISASI
SERTA DAMPAKNYA TERHADAP KEMANDIRIAN
FISKAL DAN ALOKASI BELANJA PUBLIK
(Studi Kasus pada Kabupaten/Kota di Jawa Barat 2010)**

JURNAL ILMIAH

Disusun oleh :

**Luqman Wardhanu
105020115111003**



**JURUSAN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG
2013**

LEMBAR PENGESAHAN PENULISAN ARTIKEL JURNAL

Artikel Jurnal dengan judul :

**ANALISIS IMPLEMENTASI DESENTRALISASI
SERTA DAMPAKNYA TERHADAP KEMANDIRIAN FISKAL
DAN ALOKASI BELANJA PUBLIK
(Studi Kasus pada Kabupaten/Kota di Jawa Barat 2010)**

Yang disusun oleh :

Nama : Luqman Wardhanu
NIM : 105020115111003
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Jurusan : S1 Ilmu Ekonomi

Bahwa artikel Jurnal tersebut dibuat sebagai *persyaratan ujian skripsi* yang dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal 31 Juli 2013

Malang, 31 Juli 2013

Dosen Pembimbing,

**Dr. Dwi Budi Santosa, SE.,MS.
NIP. 19620315 198701 1 001**

**ANALISIS IMPLEMENTASI DESENTRALISASI
SERTA DAMPAKNYA TERHADAP KEMANDIRIAN FISKAL
DAN ALOKASI BELANJA PUBLIK
(Studi Kasus pada Kabupaten/Kota di Jawa Barat 2010)**

Luqman Wardhanu

Dwi Budi Santosa

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang

Email: wardhanu@gmail.com, dwibudisantosa@gmail.com

ABSTRAK

Desentralisasi menjadi topik yang hangat dalam beberapa dekade belakangan ini. Pada tahun 1980, China telah mencoba menerapkan desentralisasi terhadap provinsi di China. Di Indonesia, desentralisasi diterapkan pada 2001 dan berbagai perubahan dari pola pemerintahan sentralistik menjadi desentralisasi telah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten/Kota. Desentralisasi memberi harapan baru akan tersedianya barang publik yang lebih sesuai dengan preferensi masyarakat lokal, memberi kesempatan atas pengelolaan alokasi sumber daya sekaligus meningkatkan akuntabilitas keuangan serta peranan masyarakat lokal yang lebih besar. Penelitian ini membahas mengenai dampak desentralisasi terhadap kemandirian fiskal, kemampuan belanja langsung dan kemampuan belanja tidak langsung serta terhadap alokasi belanja publik. Pengukuran kemandirian fiskal melalui rasio pendapatan asli daerah terhadap dana perimbangan. Penulis menemukan bahwa, kemandirian fiskal berpengaruh signifikan terhadap kemampuan belanja langsung, namun tidak berpengaruh signifikan terhadap kemampuan belanja tidak langsung. Terhadap alokasi belanja sektor publik, Kemandirian fiskal berpengaruh signifikan terhadap belanja sektor publik bidang kesehatan, namun tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja sektor publik bidang pendidikan dan belanja modal.

Kata kunci: Desentralisasi, kemandirian fiskal, belanja publik, alokasi anggaran publik.

A. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki jumlah pulau lebih dari sepuluh ribu pulau, terdiri dari pulau-pulau besar dan pulau-pulau kecil yang tersebar dari ujung Sumatera hingga Papua, dan sekaligus menjadi negara keempat terbesar di dunia, dari jumlah penduduknya. Dengan wilayah yang sangat luas, jumlah penduduk yang besar dan kemajemukan daerah maupun budaya, Indonesia tetap dituntut untuk mampu membangun kesejahteraan bagi warga negaranya. Baik yang berada di pulau-pulau besar maupun pulau-pulau kecil, bahkan daerah-daerah perbatasan dengan negara lain sekalipun. Setiap daerah memiliki karakteristik yang berbeda antara daerah satu dengan lainnya. Nelayan di daerah pantai memiliki masyarakat yang lebih membutuhkan bantuan mesin motor perahu untuk melaut dibandingkan dengan bantuan berupa jalan raya bagi masyarakat di daerah pegunungan. Hal ini mencerminkan adanya perbedaan-perbedaan preferensi atas kebutuhan masyarakat.

Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat berupaya memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun, dengan keterbatasan yang dimiliki oleh masyarakat, tidak semua kebutuhan dapat dipenuhi secara mandiri oleh masyarakat, sehingga diharapkan “kehadiran” pemerintah untuk membantu penyediaan kebutuhan masyarakat yang tidak dapat terpenuhi. Kebutuhan masyarakat atas ketersediaan barang yang dapat dimanfaatkan secara umum oleh masyarakat tanpa harus terjadi persaingan bagi yang memanfaatkan (*non-rivalry*), dan penggunaannya tidak dapat dibatasi pada pihak tertentu (*non-excludable*) menjadi sangat penting. Barang dengan kriteria demikian memiliki karakteristik sebagai barang publik (*Public goods*). Memang, pada awalnya, pasar akan berusaha memenuhi kebutuhan masyarakat atas barang publik. Namun, mengingat sifat barang

publik yang untuk memperolehnya tidak memerlukan persaingan dan tidak dapat diterapkan pengecualian dalam penggunaannya, akhirnya pasar (*private*) tidak mampu untuk menyediakan barang publik yang dibutuhkan masyarakat akibat besarnya biaya untuk penyediaan barang publik yang tidak sebanding dengan dana yang mungkin diterima oleh penyedia swasta atas pemanfaatan barang dimaksud. Ketidak-mampuan ini disebut kegagalan pasar (*market failure*), sehingga campur tangan pemerintah dibutuhkan untuk menyediakan barang publik. Barang publik yang secara umum dibutuhkan ialah semisal pendidikan, kesehatan, jalan raya, jembatan, taman kota, keamanan dan ketertiban serta pertahanan. Semakin tinggi kualitas masyarakat, maka permintaan terhadap ketersediaan barang publik juga makin meningkat. Semakin barang publik terpenuhi, maka kesejahteraan masyarakat juga akan semakin baik.

Pada masa orde baru, pola pemerintahan yang ada bersifat sentralistik. Hampir semua hal dikontrol oleh pemerintah pusat. Hal ini dapat dilihat antara lain dengan pola struktur kementerian (dahulu disebut Departemen) yang seluruhnya diperintah oleh struktur di pusat. Begitu pula dengan sistem kepala daerah yang dipilih oleh pemerintah tingkat pusat. Dapat dikatakan bahwa preferensi masyarakat lokal terhadap suatu barang publik diabaikan, seluruh masyarakat dianggap memiliki preferensi yang sama terhadap barang publik. Padahal secara sederhana, dapat dipahami bahwa kebutuhan untuk masyarakat di Pulau Sumatera akan berbeda dengan kebutuhan masyarakat di Pulau Kalimantan, Jawa, Sulawesi ataupun daerah-daerah lain. Sehingga, penyediaan atas barang publik yang dibutuhkan masyarakat juga semestinya berbeda.

Pada sistem sentralistik yang dilaksanakan pada masa orde baru, sebenarnya terdapat keunggulan dan kekurangan atas pelaksanaan sistem tersebut. Keunggulan yang dapat diraih ialah semua daerah akan memiliki keseragaman pelayanan publik, memperoleh fasilitas umum yang sama dan mendapatkan standarisasi yang sama secara nasional. Pola pemerintahan terpusat juga memiliki kelebihan diantaranya ialah cepatnya pengambilan keputusan di tingkat pusat, sehingga akan memberikan suatu ukuran yang sama bagi kesejahteraan warga negara.

Sementara kekurangan dari sistem sentralistik diantaranya yaitu, waktu respon terhadap kebutuhan masyarakat yang berbeda-beda mengakibatkan waktu respon yang relatif lama terhadap pengambilan kebijakan (contohnya mengenai kebutuhan aliran listrik di suatu daerah yang meski dekat dengan pembangkit listrik namun belum tentu terdapat jaringan listrik), banyaknya hierarki/birokrasi yang harus dilalui untuk suatu pengurusan administrasi mengakibatkan biaya yang harus dikeluarkan oleh masyarakat pun menjadi tinggi. Tanggung jawab yang terpusat dan kontrol atas birokrasi yang terkonsentrasi, akan menumbuhkan budaya pencari rente serta kontrol dan instruksi (pusat) yang mengabaikan pilihan dan kebutuhan masyarakat (Shah & Thompson, dalam Dixon dan Danya Hakim, 2009).

Adapun kekurangan dari sistem terpusat lainnya yakni adanya perbedaan kebutuhan antara daerah satu dengan daerah lain, yang sering kali tidak terakomodir dari kebijakan yang diambil oleh pemerintah pusat. Ketidak-puasan masyarakat terhadap kekurangan dari sistem sentralistik mendorong masyarakat menjadi merasa perlu untuk mencari terobosan sebuah sistem baru guna menjamin tersedianya dan terpenuhinya kebutuhan masyarakat melalui tersedianya barang publik. Dari kendala-kendala yang dihadapi, diharapkan ada solusi yang tepat guna memenuhi kebutuhan masyarakat atas barang publik. Solusi tersebut mengarah pada desentralisasi. Desentralisasi menjadi sebuah harapan baru bagi terpenuhinya kebutuhan masyarakat terhadap penyediaan barang publik yang sesuai dengan preferensi lokal, yang sekaligus harapan ini mendorong terjadinya reformasi di Indonesia pada tahun 1997 hingga puncaknya saat Presiden Soeharto mengundurkan diri pada tahun 1998.

Pada era reformasi, gaung otonomi daerah yang kemudian diikuti dengan tuntutan pelimpahan kewenangan pusat kepada daerah (desentralisasi) yang semakin menguat dan tak terbendung. Desentralisasi dianggap sebagai harapan baru guna memenuhi kebutuhan masyarakat yang salah satunya adalah ketersediaan atas barang publik oleh pemerintahan lokal (pemerintah daerah). Dengan ketersediaan barang publik yang dibutuhkan oleh masyarakat daerah, diharapkan nantinya akan tercapai kesejahteraan bagi masyarakat daerah.

Pada masa berikutnya, yakni ketika desentralisasi telah diimplementasikan, pemerintah daerah mendapatkan kewenangan untuk menentukan program dan kegiatan yang hendak dilakukan oleh pemerintah daerah. Bahkan kewenangan atas pengelolaan keuangan juga diberikan. Dengan kata lain, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah kewenangan pemerintahan daerah yang terdiri dari unsur pemerintah eksekutif dan legislatif (DPRD) yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program dan kegiatan yang anggarannya dicantumkan dalam APBD.

Desentralisasi juga bertujuan untuk pendelegasian kewenangan, terciptanya stabilitas politik, untuk mendekatkan wakil pemerintahan kepada masyarakat dan untuk meningkatkan akuntabilitas dan pertanggungjawaban pemerintah daerah (Bank Dunia pada Akin, 2005). Pada sisi lainnya, masih terkait dengan pengadaan barang publik, desentralisasi dipilih karena pertimbangan efisiensi atas penyediaan barang publik, sebab, secara umum, kegiatan pemerintahan yang sentralistik akan membawa dampak birokrasi yang berlapis dan panjang sedangkan desentralisasi dianggap lebih sederhana dalam birokrasi.

Adapun kaitannya antara pendapatan dengan belanja daerah, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Daerah Kementerian Keuangan, dalam ringkasan eksekutif Deskripsi dan Analisis APBD Tahun 2011, menyebutkan bahwa, “belanja dalam APBD dialokasikan untuk melaksanakan program/kegiatan sesuai dengan kemampuan pendapatannya, serta didukung oleh pembiayaan yang sehat sehingga diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, pemerataan pendapatan, serta pembangunan di berbagai sektor. Pencapaian tujuan tersebut diharapkan dapat dilakukan melalui peningkatan potensi penerimaan pajak dan retribusi daerah ditambah dengan dana transfer dari pemerintah Pusat yang digunakan untuk mendanai penyelenggaraan layanan publik dalam jumlah yang mencukupi dan juga berkualitas. Dengan belanja yang berkualitas diharapkan APBD dapat menjadi injeksi bagi peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat”. Sehingga, dapat dipahami bahwa tujuan akhir dari alokasi anggaran yang tepat akan mendorong tercapainya kesejahteraan masyarakat.

Menurut Shah (dalam Dixon dan Danya Hakim, 2009) desentralisasi akan dapat menumbuhkan pemerintahan yang lebih bertanggungjawab kepada masyarakat, mengatasi birokrasi yang panjang, mengurangi adanya pencari rente dan mendorong pemerintah lebih memperhatikan kebutuhan masyarakat karena dua hal, yakni :

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja akan disusun daerah, diajukan oleh pemerintah daerah dan disetujui oleh perwakilan masyarakat di daerah melalui DPRD,
2. Perencanaan anggaran dilakukan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang di dalamnya terdapat perwakilan masyarakat.

Dengan dua mekanisme ini, diharapkan desentralisasi dapat mendorong pemerintahan daerah untuk lebih *aware* dengan masyarakat lokal.

Pada pola desentralisasi, pemerintahan langsung dipilih oleh rakyat, sehingga pemerintahan daerah memiliki kepentingan atas dirinya untuk tetap dipercaya oleh masyarakat. Dengan demikian, ketika kewenangan pengelolaan daerah dan kewenangan pengelolaan keuangan ada pada pemerintahan daerah (eksekutif dan legislatif), maka pemerintahan daerah akan berusaha menarik simpati masyarakat memilih dengan cara menyusun program yang dibutuhkan langsung oleh masyarakat. Selain program, anggaran yang akan digunakan untuk membiayai program pun disusun, dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang notabene adalah perwakilan yang dipilih langsung oleh masyarakat.

Perencanaan anggaran dilakukan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Musrenbang sendiri merupakan forum antar-pelaku dalam menyusun rencana pembangunan nasional dan pembangunan daerah. Fungsi Musrenbang sendiri ialah menyusun rencana pembangunan yang dilaksanakan sesuai jenjang pemerintahan. Sehingga Musrenbang ada di tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan desa (Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, 2012). Dengan adanya Musrenbang, masyarakat dapat dilibatkan secara aktif dalam proses penyusunan anggaran, sehingga kebutuhan masyarakat akan langsung dapat terakomodir dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Hal ini menunjukkan, sebelum mencapai hasil akhir berupa kesejahteraan masyarakat, maka pemerintah daerah (*local government*), berkewajiban menyiapkan anggaran yang dapat dialokasikan guna membiayai program yang akan dilaksanakan. Anggaran yang harus disiapkan guna membiayai program/kegiatan pemerintahan daerah nantinya, disebut sebagai pendapatan daerah. Maka peranan pendapatan daerah sangat penting artinya bagi pelaksanaan kegiatan pemerintahan daerah.

Kemampuan daerah untuk membiayai seluruh kegiatan yang akan dilaksanakan, sangat bergantung pada seberapa besar pendapatan daerah dan sejauh mana, daerah dapat menentukan kegiatan yang akan dibiayai itu sendiri. Besarnya alokasi dana pemerintah dalam suatu sektor, menunjukkan besarnya perhatian pemerintah pada sektor tersebut. Penyediaan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat oleh pemerintah dapat dilihat dari seberapa besar alokasi anggaran yang disediakan bagi penyediaan barang publik (*public goods*).

Pendapatan daerah dapat dikategorikan dalam tiga komponen (UU No.33 Tahun 2004), yaitu :

1. Pendapatan Asli Daerah (pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan),
2. Dana Perimbangan (DAU, DAK, Dana Bagi Hasil) dan,
3. Lain-lain Pendapatan yang sah (hibah, dana darurat, dana bagi hasil pajak dari provinsi, dana penyesuaian, dana otonomi khusus, bantuan keuangan).

Beberapa permasalahan yang akan diangkat dalam jurnal ini terkait dengan apa yang menjadi perhatian penulis yakni sebagai berikut :

1. Bagaimanakah kecenderungan tingkat kemandirian fiskal di era desentralisasi?
 2. Apakah peningkatan kemandirian fiskal menyebabkan peningkatan kemampuan belanja langsung dan kemampuan belanja tidak langsung?
 3. Apakah kemandirian fiskal menyebabkan kemandirian alokasi belanja publik?
- Tujuan penulisan laporan jurnal ini dibuat untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan. Secara detil, tujuan penulisan skripsi ini dapat dituliskan sebagai berikut :

1. Mengetahui kecenderungan tingkat kemandirian fiskal pada era desentralisasi.
2. Mengetahui dampak kemandirian fiskal terhadap kemampuan belanja langsung dan belanja tidak langsung pada era desentralisasi.
3. Mengetahui dampak kemandirian fiskal terhadap kemandirian alokasi belanja publik pada era desentralisasi.

B. KAJIAN PUSTAKA

Teori Desentralisasi

Untuk mendukung penulisan jurnal, penulis juga merasa perlu untuk mendasarkan penulisan pada teori-teori yang telah ada. Sentralisasi dan desentralisasi mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Ini berarti bahwa kekurangan sentralisasi adalah kelebihan dari desentralisasi. Menurut Terry (2011) dalam bukunya *Principle of Management* mengemukakan tentang kelebihan dari sentralisasi dan desentralisasi adalah sebagai berikut :

- a. Kelebihan sentralisasi
 - 1) Keseragaman kebijakan, praktik dan keputusan yang sama;
 - 2) Kekuasaan dan prestise memperlengkap kekuasaan eksekutif;
 - 3) Penggunaan secara ahli-ahli pada kantor pusat, sebagian besar karena mereka dekat kepada manajemen teratas;
 - 4) Ahli-ahli berkualitas tinggi dapat dipergunakan, karena ruang lingkup dan banyaknya pekerjaan mereka adalah cukup untuk membantu manajer;
 - 5) Fungsi rangkap dapat ditekan sampai minimum;
 - 6) Bahaya yang timbul dari tingkah laku dapat dikurangi;
 - 7) Prosedur dan tingkat kontrol yang teliti dan memerlukan biaya besar tidak diperlukan.
 - 8) Dapat dikembangkan kelompok manajemen yang terkoordinasi tepat.
- b. Kelebihan desentralisasi
 - 1) Efisiensi dapat ditingkatkan sepanjang struktur dapat dipandang sebagai suatu kebulatan;
 - 2) Lebih berkembang generalis daripada spesialis dan dengan demikian membuka kedudukan untuk manajer umum;
 - 3) Hubungan dan kaitan yang akrab dapat ditingkatkan yang mengakibatkan gairah kerja dan koordinasi yang baik;
 - 4) Kebiasaan dengan aspek kerja yang khusus dan penting siap untuk dipergunakan;
 - 5) Struktur organisasi yang didesentralisasi memperingan beban manajemen teratas, hal ini mendorong tersebarnya beban kerja yang berguna untuk mempercepat proses kerja;
 - 6) Bagi perusahaan yang besar dan tersebar diberbagai tempat, dapat diperoleh manfaat sebesar-besarnya dari keadaan tempat masing-masing;
 - 7) Rencana dapat dicoba dalam tahap eksperimen pada suatu perusahaan, dapat diubah dan dibuktikan sebelum diterapkan pada bagian lain yang sejenis dari bagian usahanya yang sama;
 - 8) Resiko yang mencakup kerugian, kepegawaiaan, fasilitas dan perusahaan dapat terbagi.

Teori Barang Publik

Pigou berpendapat bahwa barang publik harus disediakan sampai suatu tingkat di mana kepuasan marginal akan barang publik sama dengan ketidakpuasan marginal akan pajak yang dipungut untuk membiayai program-program pemerintah atau untuk menyediakan barang publik. Hal ini dapat dimaknai bahwa masyarakat akan menuntut pemerintah terhadap penyediaan barang publik sejauh sesuai dengan pajak yang ditarik pemerintah dari masyarakat. Artinya, semakin besar pajak yang harus dibayar masyarakat, maka tuntutan atas penyediaan barang publik juga semakin besar (Mangkoesoebroto, 1993). Kelemahan teori ini adalah karena teori ini didasarkan pada ketidakpuasan marginal, sedangkan kepuasan dan ketidakpuasan adalah hal yang tidak dapat diukur secara kuantitatif.

Teori berikutnya disebut dengan teori anggaran. Teori ini menerangkan mengenai penyediaan barang-barang publik melalui anggaran. Dasar teori ini adalah analisa bahwa setiap orang membayar atas penggunaan barang-barang publik dengan jumlah yang sama, yaitu sesuai dengan sistem harga untuk barang-barang swasta. Teori alokasi barang publik melalui anggaran merupakan suatu teori analisa penyediaan barang publik yang lebih sesuai dengan kenyataan karena didasarkan pada distribusi pendapatan awal antara individu-individu dalam masyarakat, dan dapat digunakan sebagai penentu beban pajak para individu masyarakat guna membiayai pengeluaran pemerintah. Pada kenyataan di masyarakat, individu masyarakat yang memiliki kekayaan, cenderung menuntut untuk memperoleh barang publik yang lebih banyak dari sisi kualitas maupun kuantitas. Mengingat penelitian ini juga terkait dengan penyediaan barang publik dengan variabel penelitian berupa anggaran baik untuk belanja langsung, belanja tidak langsung dan belanja sektor publik, maka teori anggaran dianggap sesuai digunakan dalam penelitian ini.

Teori Perkembangan Pengeluaran Pemerintah

Menurut Musgrave (dalam Shin, 2001) fungsi pemerintah ada tiga; yakni fungsi penyediaan barang publik, fungsi redistribusi pendapatan dan fungsi stabilisasi ekonomi. Fungsi pemerintah dalam menyediakan barang publik mendapat kritikan mengenai dalam hal efisiensi. Sehingga menjadi perdebatan, apakah sistem sentralistik lebih baik, atau sistem desentralisasi lebih baik? Pada desentralisasi, penyediaan barang publik oleh pemerintahan daerah awalnya dianggap sebagai jalan keluar terbaik dari permasalahan terkait penyediaan barang publik. Namun pada kenyataan di lapangan, pemerintahan daerah tidak semuanya mampu melaksanakan desentralisasi. Hal ini dikarenakan keterbatasan yang dimiliki pemerintah daerah atas beban tanggung jawab penyediaan barang publik.

Musgrave (Mangkoesoebroto, 1993) juga berpendapat bahwa dalam suatu proses pembangunan, investasi swasta dalam persentase terhadap GNP semakin besar dan persentase investasi pemerintah dalam persentase GNP akan semakin kecil. Hal ini berarti, penyediaan barang publik juga dapat disediakan oleh swasta, sehingga pemerintah dapat memindahkan alokasi kepada sektor lain yang masuk prioritas.

Rostow (Mangkoesoebroto, 1993) mengemukakan bahwa pada tingkat ekonomi yang lebih lanjut, aktivitas pemerintah beralih dari penyediaan prasarana kepada pengeluaran-pengeluaran untuk aktivitas sosial seperti halnya program pensiun, program pelayanan kesehatan masyarakat. Jika kondisi Indonesia telah sampai pada tahap ekonomi lanjut, maka alokasi belanja sektor publik bidang kesehatan diperkirakan akan sangat responsif terhadap peningkatan kemandirian fiskal. Artinya, jika kemandirian fiskal meningkat, maka alokasi belanja sektor publik bidang kesehatan relatif akan meningkat guna menyediakan barang publik bidang kesehatan.

Peacock dan Wiseman mengajukan suatu teori tentang perkembangan pengeluaran pemerintah yang menyampaikan bahwa perkembangan ekonomi menyebabkan pemungutan pajak yang semakin meningkat walaupun tarif pajak tidak berubah; dan meningkatnya penerimaan pajak akan mendorong pengeluaran pemerintah juga semakin meningkat.

C. METODE PENELITIAN

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Dalam penelitiannya, Ding (2007) menggunakan rasio anggaran pendapatan daerah (PAD) terhadap pendapatan yang diterima dari pusat (dana perimbangan) untuk mengukur kemandirian fiskal. Penelitian dalam jurnal ini mengacu pada cara pengukuran desentralisasi (kemandirian fiskal) dari Ding (2007), sebab secara logis dapat dipahami bahwa dalam suatu

permufakatan untuk tujuan bersama, lazimnya, pihak yang memberikan kontribusi lebih besar adalah pengambil keputusan. Maka, dalam penentuan program dan kegiatan pemerintahan daerah otonom, mana yang lebih besar apakah PAD atau dana perimbangan dari pusat, itulah pengambil keputusan terhadap program dan kegiatan pemerintahan daerah.

Sehingga, definisi operasional dari masing-masing variabel penelitian ini ialah :

1. Kemandirian fiskal

Kemandirian fiskal diukur dari rasio pendapatan asli daerah (PAD) terhadap dana perimbangan (DP) sebagai dana yang diperoleh daerah dari pusat (Ding, 2007), objek penelitian periode tahun 2010 dalam persentase

$$KF = \frac{\text{Pendapatan asli daerah}}{\text{Dana Perimbangan}}$$

2. Kemandirian Belanja langsung

Belanja langsung diukur dari data belanja langsung yang angkanya terdapat pada masing-masing anggaran pendapatan dan belanja daerah objek penelitian, dalam persentase

$$KBL = \frac{\text{Belanja Langsung}}{\text{Dana Perimbangan}}$$

3. Kemandirian Belanja tidak langsung

Belanja tidak langsung diukur dari data belanja tidak langsung pada masing-masing anggaran pendapatan dan belanja daerah objek penelitian dalam persentase

$$KBTL = \frac{\text{Belanja Tidak Langsung}}{\text{Dana Perimbangan}}$$

2. Total belanja daerah

Total belanja daerah diukur dari data total belanja pada masing-masing anggaran pendapatan dan belanja daerah objek penelitian dalam satuan rupiah

3. Belanja sektor publik

Alokasi anggaran belanja sektor publik diproyeksi pada alokasi anggaran belanja bidang pendidikan, kesehatan dan belanja modal dalam satuan rupiah. Dasar pengukuran diperoleh dari pola perhitungan Iwan Barankay dan Ben Lockwood dalam menghitung pengeluaran dalam rangka desentralisasi pada penelitiannya di Swiss yang menghitung pengeluaran desentralisasi dari rasio pengeluaran lokal terhadap pengeluaran total pusat dan daerah (Barankay and Lockwood, 2007). Maka, dalam penelitian ini digunakan pola perhitungan belanja sektor publik bidang tertentu yang merupakan rasio belanja sektor publik bidang tertentu tersebut terhadap total belanja yang dilakukan pemerintahan daerah. Variabel dalam penelitian diantaranya yaitu Belanja sektor publik bidang pendidikan (BSPPd), Belanja sektor publik bidang kesehatan (BSPKs), Belanja sektor publik modal (BSPMd), dengan pola penghitungan sebagai berikut :

$$BSPPd = \frac{\text{Belanja bidang Pendidikan}}{\text{Total Belanja}}$$

$$BSPKs = \frac{\text{Belanja bidang Kesehatan}}{\text{Total Belanja}}$$

$$BSPMd = \frac{\text{Belanja Modal}}{\text{Total Belanja}}$$

Objek, Tempat dan Waktu Penelitian

Objek penelitian, dikarenakan penelitian ini terkait dengan desentralisasi, dan pelaksanaan desentralisasi yang riil adalah Kabupaten/Kota, maka yang ditetapkan objek penelitian adalah Kabupaten/Kota.

Terkait tempat, dikarenakan penelitian berfokus penyediaan barang publik yang berorientasi kepada masyarakat/penduduk, sedangkan penduduk terbesar terdapat di Provinsi Jawa Barat, sehingga secara lengkap penelitian menggunakan bahan penelitian Kabupaten/Kota di wilayah Jawa Barat. Dengan jumlah Kabupaten / Kota sebanyak 26, terdiri dari 17 Kabupaten dan 9 Kota. Jawa Barat merupakan provinsi dengan populasi penduduk terbanyak di Indonesia dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia, dihuni oleh 43.021.826 jiwa (sensus tahun 2010). Tingginya jumlah penduduk mendorong kebutuhan atas barang publik juga semakin tinggi. Sehingga dengan populasi penduduk yang tinggi Jawa Barat dianggap sebagai populasi yang menarik untuk bahan analisa.

Waktu penelitian, dipilih didasarkan pada kenyataan di lapangan bahwa audit terhadap laporan keuangan secara umum baru dapat dilakukan setelah beberapa waktu kemudian dari masa tahun anggaran berakhir. Hal ini dikarenakan lambatnya proses pelaporan keuangan dari daerah. Sehingga, pada proses kajian pustaka, data yang diperoleh secara lengkap dan dianggap valid adalah berdasarkan data tahun 2010. Maka data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data tahun 2010.

Metode Analisis Data

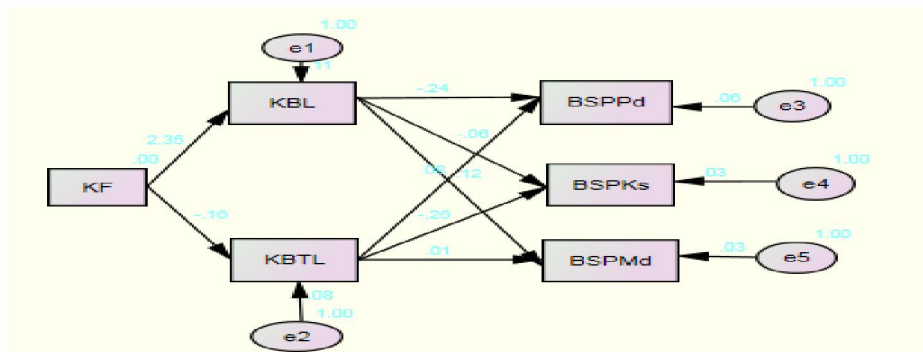
Karena variabel-variabel dalam penelitian bersifat *observable* serta pada variabel yang digunakan yakni berupa variabel eksogenus dan variabel endogenus, namun terdapat variabel endogenus yang diduga berpengaruh terhadap variabel endogenus lain (secara umum disebut variabel antara). Sehingga alat analisa yang dianggap tepat yakni analisis jalur (*Path Analysis*).

D. PEMBAHASAN

Analisis Jalur

Pada penelitian ini, analisis yang digunakan adalah dengan menggunakan analisis jalur (*path analysis*). Analisis ini digunakan untuk mengetahui tingkat pengaruh pada suatu hubungan kausal, yang dilakukan dari kajian pustaka atas data sekunder.

Gambar 1 **Diagram Jalur**



Sumber : Data diolah, 2013

Selanjutnya, dari diagram jalur pada gambar Diagram jalur tersebut, dapat pula dinyatakan dalam bentuk persamaan sebagai berikut :

1. $Z_{BSPPd} = \beta_1 Z_{KF} + \beta_2 Z_{KBTl} + \beta_3 Z_{KBL} + \varepsilon_1$
2. $Z_{BSPKs} = \beta_4 Z_{KF} + \beta_5 Z_{KBTl} + \beta_6 Z_{KBL} + \varepsilon_2$
3. $Z_{BSPMd} = \beta_7 Z_{KF} + \beta_8 Z_{KBTl} + \beta_9 Z_{KBL} + \varepsilon_3$

Pembahasan untuk Rumusan Masalah

Rumusan masalah 1

Bagaimanakah kecenderungan tingkat kemandirian fiskal di era desentralisasi?

Untuk menjawab rumusan masalah 1, akan digambarkan dengan data rata-rata Kabupaten/Kota sebagai berikut :

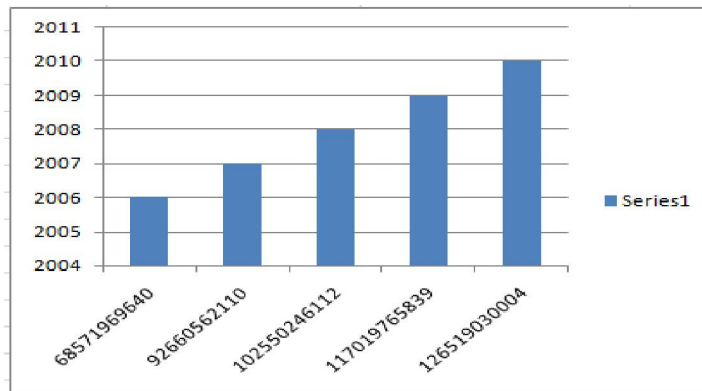
Gambar 2 Data Rata-rata PAD dan Dana Perimbangan

TAHUN	PAD	DP	KF
2006	68571969640	608496394800	0.1171
2007	92660562110	734479680211	0.1258
2008	102550246112	486558268346	0.1288
2009	117019765839	866162614748	0.1333
2010	126519030004	876401023684	0.1417

Sumber : Data diolah, 2013

Data di atas merupakan data rata-rata PAD dan Dana Perimbangan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat untuk tahun anggaran 2006 hingga 2010. Data ini digunakan dengan tujuan untuk memberikan gambaran kemandirian fiskal pada masa desentralisasi. Guna menggambarkan data angka di atas lebih dijelaskan dengan dengan grafik PAD dan grafik Kemandirian Fiskal berikut ini :

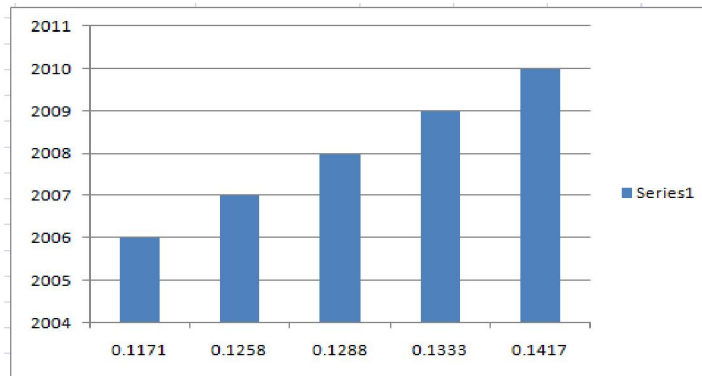
Gambar 3 Grafik PAD



Sumber : Data diolah, 2013

Selanjutnya dapat digambarkan mengenai kemandirian fiskal melalui garfik berikut :

Gambar 4 Grafik Kemandirian Fiskal



Sumber : Data diolah, 2013

Berdasarkan data dan grafik yang ditampilkan, dapat diterjemahkan bahwa pada era desentralisasi, seluruh Kabupaten/Kota di Jawa Barat kemandirian fiskalnya cenderung meningkat. Hal ini dibuktikan dengan tingkat kemandirian fiskal rata-rata per tahun dari tahun 2006 hingga tahun 2010. Pada tahun 2006, rata-rata kemandirian fiskal seluruh Kabupaten/Kota di Jawa Barat sebesar 0,1171. Kemudian meningkat menjadi 0,1258 pada tahun 2007 dan pada tahun 2010, rata-rata kemandirian fiskal untuk Kabupaten/Kota di Jawa Barat mencapai 0,1417. Hal ini lebih disebabkan adanya kenaikan PAD yang diperoleh oleh daerah, lebih tinggi dibanding kenaikan dana perimbangan yang ditransfer oleh pusat. Peningkatan kemandirian daerah kurun waktu 2006 hingga tahun 2010, menunjukkan bahwa tujuan adanya desentralisasi untuk meningkatkan kemandirian daerah telah tercapai.

Rumusan masalah 2

Apakah peningkatan kemandirian fiskal menyebabkan peningkatan kemampuan belanja langsung dan kemampuan belanja tidak langsung? Sebagaimana struktur APBD yang dibuat berdasarkan Permendagri No.13 tahun 2006, bahwa pendapatan daerah terdiri dari PAD, Dana Perimbangan (DP) dan Dana Bagi Hasil (DBH), sedangkan belanja dikelompokkan menjadi belanja langsung dan belanja tidak langsung. Maka rumusan masalah 2 berarti, dapat dilihat dari pengaruh kemandirian fiskal terhadap belanja langsung dan terhadap belanja tidak langsung.

Pengaruh peningkatan kemandirian fiskal terhadap belanja langsung dapat ditelaah dari hasil olah data yang ditampilkan dalam tabel berikut :

Tabel 1 Hasil Analisis Path KF terhadap KBL

Variabel	Beta	t_{hitung}	Sig t	Keterangan
KF	0.838	7.525	0.000	Signifikan
t_{tabel}	=	2.073		
R Square	=	0.702		

Sumber : Data diolah, 2013

Dari Tabel 1 di atas dapat dijelaskan bahwa tingkat signifikansi pengaruh kemandirian fiskal terhadap kemandirian belanja langsung sebesar 0,000, yang berarti signifikan. Dalam hal ini kemandirian fiskal berpengaruh terhadap belanja langsung. Artinya, ketika PAD meningkat lebih besar dibanding peningkatan Dana perimbangan (sehingga kemandirian fiskal meningkat) maka kemampuan belanja langsung (KBL) juga relatif meningkat.

Dalam konteks APBD, dapat dikatakan bahwa pada tahun 2010, seluruh pemerintahan Kabupaten/Kota di Jawa Barat meningkatkan alokasi anggaran belanja langsung ketika terjadi peningkatan kemandirian fiskal. Hal ini juga menunjukkan adanya kesamaan pola alokasi anggaran belanja langsung antar pemerintahan daerah di Jawa Barat. Di sisi lain, dengan adanya desentralisasi yang memberikan otonomi fiskal kepada pemerintahan Kabupaten/Kota di Jawa Barat, peningkatan kemandirian fiskal digunakan untuk peningkatan kemampuan belanja langsung, dengan pola manajemen keuangan yang cenderung sama antara pemerintah daerah satu dengan lainnya.

Masih terkait dengan rumusan masalah 2, mengenai pengaruh peningkatan kemandirian fiskal terhadap kemampuan belanja tidak langsung dapat dilihat dari analisa berikut :

Tabel 2 Hasil Analisis Path KF terhadap KBTL

Variabel	Beta	t_{hitung}	Sig t	Keterangan
KF	-0.130	-0.641	0.528	Tidak Signifikan
t_{tabel}	=	2.073		
R Square	=	0.017		

Sumber : Data diolah, 2013

Dari tabel 2 di atas dapat dijelaskan bahwa tingkat signifikansi pengaruh kemandirian fiskal terhadap kemampuan belanja tidak langsung sebesar 0,528, yang berarti tidak signifikan. Dalam hal ini, kemandirian fiskal tidak berpengaruh signifikan terhadap kemampuan belanja tidak langsung. Jadi, ketika PAD meningkat lebih besar dibanding peningkatan Dana perimbangan (kemandirian fiskal meningkat) ternyata belanja tidak langsung Kabupaten/Kota di Jawa Barat tidak meningkat. Atau, ada Kabupaten/Kota yang meningkatkan alokasi anggaran belanja tidak langsung-nya, namun tidak berlaku untuk seluruh Kabupaten/Kota. Artinya, masing-masing Kabupaten/Kota tidak memiliki pola alokasi anggaran (belanja tidak langsung) yang sama.

Pengaruh Kemandirian Fiskal terhadap Kemampuan Belanja Tidak Langsung yang tidak signifikan menunjukkan bahwa dalam konteks APBD, pada tahun 2010 dari 26 pemerintahan

Kabupaten/Kota di Jawa Barat tidak seluruhnya meningkatkan belanja tidak langsung-nya ketika kemandirian fiskal-nya meningkat. Ini dapat pula dijelaskan bahwa ada kemungkinan prioritas alokasi anggaran pada tiap Kabupaten/Kota berbeda-beda antara satu Kabupaten/Kota dengan Kabupaten/Kota yang lain di Provinsi Jawa Barat.

Rumusan masalah 3

Perhitungan koefisien *path* pada penelitian ini menggunakan analisis regresi *standardize* dengan melihat pengaruh secara simultan dan parsial pada masing-masing persamaan. Metode yang digunakan adalah *ordinary least square* (OLS) yaitu metode kuadrat terkecil dihitung dengan menggunakan perangkat lunak SPSS versi 17.0.

Pengaruh KF, KBTL, KBL terhadap BSPPd

Hasil uji regresi *standardize* ditunjukkan pada tabel 3 :

Tabel 3 Hasil Analisis Path KF, KBTL, KBL terhadap BSPPd

Variabel	Beta	t_{hitung}	Sig t	Keterangan
KF	-0.133	-0.405	0.689	Tidak Signifikan
KBL	-0.458	-1.315	0.202	Tidak Signifikan
KBTL	0.112	0.582	0.567	Tidak Signifikan
t_{tabel}		= 2.073		
R Square		= 0.383		

Sumber : Data diolah, 2013

Dari tabel 3 di atas dapat disimpulkan bahwa :

- Dari nilai R Square menunjukkan nilai sebesar 0.383 atau 38.3%. Artinya bahwa Belanja Sektor Publik bidang Pendidikan dipengaruhi sebesar 38.3% oleh Kemandirian Fiskal, Kemampuan Belanja Tidak Langsung dan Kemampuan Belanja Langsung. Sedangkan sisanya sebesar 61.7% dipengaruhi oleh variabel lain di luar variabel bebas yang diteliti.
- Persamaan regresi *standardize* (Beta) :

$$Z_{BSPPd} = -0.133 Z_{KF} - 0.458 Z_{KBTL} + 0.112 Z_{KBL}$$
- Dari nilai t_{hitung} menunjukkan bahwa :
 - Variabel Kemandirian Fiskal memiliki nilai t_{hitung} sebesar -0.405 dengan probabilitas sebesar 0.689. Karena $|t_{hitung}| < t_{tabel}$ ($0.405 < 2.073$) atau $\text{sig } t > 5\%$ ($0.689 > 0.05$) maka peningkatan Kemandirian Fiskal tidak berpengaruh signifikan terhadap alokasi anggaran Belanja Sektor Publik bidang Pendidikan.
 - Variabel Kemampuan Belanja Langsung memiliki nilai t_{hitung} sebesar -1.315 dengan probabilitas sebesar 0.202. Karena $|t_{hitung}| < t_{tabel}$ ($1.315 < 2.073$) atau $\text{sig } t > 5\%$ ($0.202 > 0.05$) maka peningkatan Kemampuan Belanja Langsung tidak berpengaruh signifikan terhadap alokasi anggaran Belanja Sektor Publik bidang Pendidikan.
 - Variabel Kemampuan Belanja Tidak Langsung memiliki nilai t_{hitung} sebesar 0.582 dengan probabilitas sebesar 0.567. Karena $|t_{hitung}| < t_{tabel}$ ($0.582 < 2.073$) atau $\text{sig } t > 5\%$ ($0.567 > 0.05$) maka peningkatan Kemampuan Belanja Tidak Langsung tidak berpengaruh signifikan terhadap alokasi anggaran Belanja Sektor Publik bidang Pendidikan.

Dari data di atas, dinyatakan bahwa pengaruh peningkatan kemandirian fiskal, peningkatan kemampuan belanja langsung dan kemampuan belanja tidak langsung berpengaruh tidak signifikan terhadap alokasi belanja sektor publik bidang pendidikan. Sehingga dapat diartikan bahwa peningkatan kemandirian fiskal tidak selalu meningkatkan alokasi belanja sektor publik bidang pendidikan. Dari 26 Kabupaten/Kota, bukan tidak mungkin ada Kab./Kota yang turut meningkatkan alokasi belanja sektor publik bidang pendidikan, namun, tidak seluruh Kabupaten/Kota turut meningkatkan alokasi belanja-nya. Sehingga pola alokasi belanja sektor publik pendidikan di Kabupaten/Kota di Jawa Barat relatif tidak sama.

Pengaruh kemandirian fiskal sebagai unsur pendapatan, yang tidak signifikan terhadap alokasi belanja sektor publik bidang pendidikan, menunjukkan bahwa mungkin pada beberapa Kabupaten/Kota, belanja sektor publik bidang pendidikan bukanlah hal yang menjadi preferensi

utama. Hal ini dapat terjadi jika swasta sudah mampu menyediakan fasilitas pendidikan yang diharapkan masyarakat. Sehingga peran pemerintah sebagai penyedia barang publik bidang pendidikan tidak terlalu dominan.

Adapun perbedaan kebijakan pemerintah Kabupaten/Kota yang berbeda untuk alokasi belanja sektor publik bidang pendidikan dapat saja dikarenakan adanya perbedaan prioritas alokasi anggaran pada masing-masing Kabupaten/Kota.

Pengaruh KF, KBTL, KBL terhadap BSPKs

Hasil uji regresi *standardize* ditunjukkan tabel 4 :

Tabel 4 Hasil Analisis Path KF, KBTL, KBL terhadap BSPKs

Variabel	Beta	t_{hitung}	Sig t	Keterangan
KF	0.754	2.378	0.027	Signifikan
KBL	-0.960	2.842	0.009	Signifikan
KBTL	-0.706	3.797	0.001	Signifikan
$t_{tabel} = 2.073$				
R Square = 0.419				

Sumber : Data diolah, 2013

Dari tabel 4 di atas dapat disimpulkan bahwa :

- Dari nilai R Square menunjukkan nilai sebesar 0.419 atau 41.9%. Artinya bahwa Belanja Sektor Publik bidang Kesehatan dipengaruhi sebesar 41.9% oleh Kemandirian Fiskal, Kemampuan Belanja Tidak Langsung dan Kemampuan Belanja Langsung. Sedangkan sisanya sebesar 58.1% dipengaruhi oleh variabel lain di luar variabel bebas yang diteliti.
- Persamaan regresi *standardize* (Beta) :

$$Z_{BSPKs} = 0.754 Z_{KF} - 0.960 Z_{KBTL} - 0.706 Z_{KBL}$$
- Dari nilai t_{hitung} menunjukkan bahwa :
 - Variabel Kemandirian Fiskal memiliki nilai t_{hitung} sebesar 2.378 dengan probabilitas sebesar 0.027. Karena $|t_{hitung}| > t_{tabel}$ ($2.378 > 2.073$) atau $\text{sig } t < 5\%$ ($0.027 < 0.05$) maka peningkatan Kemandirian Fiskal berpengaruh signifikan terhadap alokasi anggaran Belanja Sektor Publik bidang Kesehatan.
 - Variabel Kemampuan Belanja Langsung memiliki nilai t_{hitung} sebesar -2.842 dengan probabilitas sebesar 0.009. Karena $|t_{hitung}| > t_{tabel}$ ($2.842 > 2.073$) atau $\text{sig } t < 5\%$ ($0.009 < 0.05$) maka peningkatan Kemampuan Belanja Langsung berpengaruh signifikan terhadap alokasi anggaran Belanja Sektor Publik bidang Kesehatan.
 - Variabel Kemampuan Belanja Tidak Langsung memiliki nilai t_{hitung} sebesar -3.797 dengan probabilitas sebesar 0.001. Karena $|t_{hitung}| > t_{tabel}$ ($3.797 > 2.073$) atau $\text{sig } t < 5\%$ ($0.001 < 0.05$) maka peningkatan Kemampuan Belanja Tidak Langsung berpengaruh signifikan terhadap alokasi anggaran Belanja Sektor Publik bidang Kesehatan.

Dapat disimpulkan bahwa pengaruh kemandirian fiskal, kemampuan belanja langsung dan kemampuan belanja tidak langsung berpengaruh signifikan terhadap alokasi belanja sektor publik bidang kesehatan. Sehingga dapat diartikan bahwa peningkatan kemandirian fiskal diikuti dengan peningkatan alokasi belanja sektor publik bidang kesehatan. Dari 26 Kabupaten/Kota, seluruh Kab./Kota turut meningkatkan alokasi belanja sektor publik bidang kesehatan. Sehingga pola alokasi belanja sektor publik bidang kesehatan di Kabupaten/Kota di Jawa Barat relatif sama atau terpola.

Untuk belanja sektor publik bidang kesehatan, pengeluaran pemerintah dalam bidang kesehatan sesuai dengan teori yang digunakan, yakni Teori Peacock dan Wiseman, yang menyatakan bahwa ketika pendapatan negara meningkat, maka akan terjadi peningkatan pengeluaran negara. Hal ini dibuktikan dengan adanya peningkatan kemandirian fiskal (pendapatan) yang berpengaruh secara signifikan terhadap peningkatan alokasi belanja sektor publik bidang kesehatan.

Berarti, ada kemungkinan meningkatnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya kesehatan. Yakni ketika masyarakat membayar pajak (penerimaan pemerintah meningkat) maka

masyarakat juga menuntut adanya peningkatan barang publik di bidang kesehatan, baik itu asuransi kesehatan, pelayanan kesehatan maupun fasilitas kesehatan di tingkat pemerintahan daerah. Secara otomatis ketika pemerintah meningkatkan penyediaan barang publik, maka hal itu akan membebani anggaran. Dan pada akhirnya alokasi belanja sektor publik bidang kesehatan meningkat seiring dengan peningkatan kemandirian fiskal.

Pengaruh KF, KBTL, KBL terhadap BSPMd

Hasil uji regresi *standardize* ditunjukkan tabel di bawah ini:

Tabel 5 Hasil Analisis Path KF, KBTL, KBL terhadap BSPMd

Variabel	Beta	t_{hitung}	Sig t	Keterangan
KF	-0.177	-0.518	0.610	Tidak Signifikan
KBL	0.728	1.996	0.058	Tidak Signifikan
KBTL	0.047	0.233	0.818	Tidak Signifikan
$t_{tabel} = 2.073$				
$R\ Square = 0.324$				

Sumber : Data diolah, 2013

Dari tabel 5 di atas dapat disimpulkan bahwa :

- Dari nilai R Square menunjukkan nilai sebesar 0.324 atau 32.4%. Artinya bahwa Belanja Sektor Publik Modal dipengaruhi sebesar 32.4% oleh Kemandirian Fiskal, Kemampuan Belanja Tidak Langsung dan Kemampuan Belanja Langsung. Sedangkan sisanya sebesar 67.6% dipengaruhi oleh variabel lain di luar variabel bebas yang diteliti.
- Persamaan regresi *standardize* (Beta) :

$$Z_{BSPMd} = -0.177 Z_{KF} + 0.728 Z_{KBTL} + 0.047 Z_{KBL}$$
- Dari nilai t_{hitung} menunjukkan bahwa :
 - Variabel Kemandirian Fiskal memiliki nilai t_{hitung} sebesar -0.518 dengan probabilitas sebesar 0.610. Karena $|t_{hitung}| < t_{tabel}$ ($0.518 < 2.073$) atau $\text{sig } t > 5\%$ ($0.610 > 0.05$) maka peningkatan Kemandirian Fiskal tidak berpengaruh signifikan terhadap alokasi anggaran Belanja Sektor Publik Modal.
 - Variabel Kemampuan Belanja Langsung memiliki nilai t_{hitung} sebesar 1.996 dengan probabilitas sebesar 0.058. Karena $|t_{hitung}| < t_{tabel}$ ($1.996 < 2.073$) atau $\text{sig } t > 5\%$ ($0.058 > 0.05$) maka peningkatan Kemampuan Belanja Langsung tidak berpengaruh signifikan terhadap alokasi anggaran Belanja Sektor Publik Modal.
 - Variabel Kemampuan Belanja Tidak Langsung memiliki nilai t_{hitung} sebesar 0.233 dengan probabilitas sebesar 0.818. Karena $|t_{hitung}| < t_{tabel}$ ($0.233 < 2.073$) atau $\text{sig } t > 5\%$ ($0.818 > 0.05$) maka peningkatan Kemampuan Belanja Tidak Langsung tidak berpengaruh signifikan terhadap alokasi anggaran Belanja Sektor Publik Modal.

Untuk pengaruh terhadap belanja sektor publik modal, dinyatakan bahwa pengaruh kemandirian fiskal, kemampuan belanja langsung dan kemampuan belanja tidak langsung, berpengaruh tidak signifikan terhadap alokasi anggaran belanja sektor publik modal. Sehingga dapat diartikan bahwa peningkatan kemandirian fiskal tidak selalu meningkatkan alokasi anggaran belanja sektor publik modal. Dari 26 Kabupaten/Kota, mungkin saja ada Kab./Kota yang meningkatkan alokasi anggaran belanja sektor publik modal seiring dengan peningkatan kemandirian fiskal, peningkatan kemampuan belanja langsung maupun kemampuan belanja tidak langsung namun, tidak seluruh Kabupaten/Kota turut meningkatkan alokasi belanja modal-nya. Sehingga pola alokasi anggaran belanja sektor publik modal di Kabupaten/Kota di Jawa Barat relatif tidak sama.

Adapun perbedaan kebijakan pemerintah Kabupaten/Kota yang berbeda untuk alokasi belanja sektor publik modal bisa dikarenakan adanya perbedaan prioritas pengeluaran dalam alokasi anggaran pada masing-masing Kabupaten/Kota. Sehingga secara kolektif alokasi anggaran belanja sektor publik modal sebagai pengeluaran relatif tidak dipengaruhi oleh peningkatan kemandirian fiskal (pendapatan). Hal ini berbeda dengan Teori dari Peacock dan Wiseman, bahwa penerimaan negara yang meningkat akan mendorong pengeluaran negara juga meningkat. Pengeluaran negara sendiri meningkat akibat adanya tuntutan masyarakat yang lebih besar terhadap barang publik untuk disediakan oleh pemerintah. Namun, ketika ada peningkatan

kemandirian fiskal (pendapatan) ternyata mungkin preferensi masyarakat bukanlah pada belanja modal. Sehingga ketika kemandirian fiskal pemerintahan daerah meningkat, hal ini tidak dibarengi dengan peningkatan alokasi anggaran belanja sektor publik untuk belanja modal.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dari hasil pembahasan yang telah dilakukan, dapat diambil kesimpulan bahwa pada masa desentralisasi kurun waktu tahun 2006 hingga 2010 daerah Kabupaten/Kota di Jawa Barat relatif mengalami peningkatan kemandirian fiskal. Peningkatan kemandirian fiskal itu sendiri dipicu oleh peningkatan pendapatan asli daerah yang relatif lebih tinggi dari peningkatan dana perimbangan yang diperoleh dari pemerintah pusat, sehingga kemandirian fiskal daerah Kabupaten/Kota di Jawa Barat selama kurun waktu tahun 2006 hingga 2010 cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 2006, pendapatan asli daerah rata-rata Kabupaten/Kota di Jawa Barat sebesar Rp.68.571.969.640,00 dengan perolehan dana perimbangan dari pusat sebesar Rp.608.496.394.800,00. Dengan demikian pada tahun 2006, kemandirian fiskal yang dicapai sebesar 0,1171. Kemudian pada tahun 2007, pendapatan asli daerah rata-rata Kabupaten/Kota di Jawa Barat sebesar Rp.92.660.562.110,00 sedangkan perolehan dana perimbangan pada tahun 2007 sebesar Rp.734.479.680.211,00 sehingga kemandirian fiskal yang dicapai pada tahun 2007 sebesar 0,1258. Kemudian pada tahun 2010, kemandirian fiskal rata-rata yang telah diraih mencapai 0,1417. Ini menunjukkan tren/kecenderungan kemandirian fiskal Kabupaten/Kota di Jawa Barat pada era desentralisasi relatif meningkat.

Adapun kemandirian fiskal berpengaruh signifikan terhadap kemampuan belanja langsung. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah di seluruh Kabupaten/Kota memiliki kebijakan anggaran yang relatif sama mengenai alokasi belanja langsung-nya. Sehingga terbentuk kesamaan alokasi anggaran belanja langsung yang meningkat seiring dengan peningkatan kemandirian fiskal. Peningkatan alokasi belanja langsung yang serempak, juga dapat dimaknai dengan kesamaan preferensi pada masyarakat yang memandang perlunya penyediaan barang publik melalui alokasi belanja langsung. Sebab, dengan meningkatnya kemampuan belanja langsung akan berdampak nyata terhadap penyediaan barang publik berupa fasilitas publik yang menjadi preferensi masyarakat di Jawa Barat secara umum.

Sedangkan untuk belanja tidak langsung, masing-masing Kabupaten/Kota memiliki kebijakan atau prioritas yang berbeda-beda. Dengan kata lain, alokasi belanja tidak langsung pada tiap-tiap Kabupaten/Kota tidak memiliki pola yang sama. Hal ini mungkin terkait dengan kegiatan belanja tidak langsung yang lebih bersifat administratif, sehingga kebijakan antar Kabupaten/Kota menjadi tidak sama.

Kesimpulan berikut yaitu bahwa peningkatan kemandirian fiskal (KF), kemampuan belanja langsung (KBL) dan kemampuan belanja tidak langsung (KBTL) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap alokasi anggaran belanja sektor publik bidang kesehatan (BSPKs). Dapat dipahami bahwa dengan meningkatnya kemandirian fiskal, kemampuan belanja langsung maupun kemampuan belanja tidak langsung akan berpengaruh terhadap alokasi belanja sektor publik bidang kesehatan. Semakin tinggi kemandirian fiskal, maka penyediaan barang publik di bidang kesehatan berupa fasilitas kesehatan di Kabupaten/Kota tersebut akan semakin meningkat. Ada kemungkinan bahwa masyarakat di Jawa Barat secara umum memilih penyediaan barang publik bidang kesehatan sebagai preferensi. Dengan kondisi demikian, maka teori yang dikemukakan Rostow bisa jadi benar. Rostow (Mangkoesoebroto, 1993) mengemukakan bahwa pada tingkat ekonomi yang lebih lanjut, aktivitas pemerintah beralih dari penyediaan prasarana kepada pengeluaran-pengeluaran untuk aktivitas sosial seperti halnya program pensiun, program pelayanan kesehatan masyarakat.

Dengan demikian maka tuntutan masyarakat atas barang publik bidang kesehatan akan meningkat, dan berakibat pada meningkatnya alokasi belanja sektor publik bidang kesehatan, seiring meningkatnya kemandirian fiskal.

Saran

Adapun saran yang diajukan penulis dalam penelitian ini terkait hasil pembahasan, yakni pemerintah daerah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Jawa Barat hendaknya berupaya untuk tetap mempertahankan peningkatan kemandirian fiskal, sekaligus mengoptimalkan proses

penganggaran di tingkat Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) sehingga preferensi masyarakat atas barang publik dapat terakomodir dalam alokasi belanja pada anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) sebagaimana yang dinyatakan oleh Dixxon dan Hakim (2009) bahwa kemampuan membuat kebijakan berpengaruh pada kemampuan untuk mendiagnosa prioritas sosial dan prioritas pembangunan serta menerjemahkannya ke dalam suatu kebijakan operasional dengan perkiraan anggaran yang jelas guna memperoleh efektivitas biaya melalui proses penganggaran dengan memastikan fleksibilitas alokasi. Hal yang juga dapat dilakukan adalah dengan mengurangi ketergantungan terhadap dana perimbangan, sehingga setiap daerah mampu meningkatkan kemandirian fiskal.

Saran berikutnya yaitu, dengan menentukan skala prioritas terhadap penyediaan barang publik sesuai preferensi masyarakat lokal. Pada belanja publik yang memang membutuhkan alokasi dana sangat besar, hendaknya tetap ditangani oleh pemerintah pusat. Hal ini perlu dilakukan untuk tetap dapat mengoptimalkan pendanaan yang ada guna memenuhi skala prioritas yang mungkin dicapai oleh daerah. Adapun mengenai peningkatan kemandirian fiskal yang berpengaruh signifikan terhadap kemampuan belanja langsung, kiranya sudah tepat demikian. Sebab, ketika kemandirian fiskal mempengaruhi secara signifikan terhadap belanja langsung, maka hal ini berarti telah tercapai efisiensi dalam penyediaan barang publik. Hal ini terkait dari belanja langsung itu sendiri yang merupakan kelompok belanja modal, belanja barang dan jasa serta honor dalam rangka kegiatan belanja langsung. Dan sebaliknya, jika peningkatan kemandirian daerah justru meningkatkan kemampuan belanja tidak langsung, berarti terjadi inefisiensi. Hal ini dikarenakan belanja tidak langsung lebih merupakan belanja administratif.

Kemudian mengenai peningkatan kemandirian fiskal yang berpengaruh positif terhadap belanja sektor publik bidang kesehatan, hal ini menunjukkan bahwa belanja sektor publik bidang kesehatan menjadi prioritas bagi seluruh Kabupaten/Kota di Jawa Barat. Saran yang disampaikan bagi Kabupaten/Kota di Jawa Barat yakni dengan terus meningkatkan kualitas belanja publik bidang kesehatan, dalam artian belanja lebih banyak dialokasikan bagi kegiatan yang bersinggungan dengan masyarakat, misalnya jaminan kesehatan masyarakat tidak mampu, program penyediaan tenaga kesehatan yang berkualitas dan fasilitas kesehatan yang cukup sesuai kebutuhan masyarakat lokal.

UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam penulisan jurnal ini penulis menyadari bahwa selama melakukan persiapan, pengumpulan data, penyusunan konsep hingga penyusunan laporan skripsi ini mendapat banyak sekali bantuan baik berupa dukungan moral hingga material berupa bahan laporan, yang penulis terima dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karenanya, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada ;

1. Bapak Dr. Ghozali Maski, SE.,MS. selaku Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang;
2. Bapak Dr. Dwi Budi Santoso, SE.,MS. selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia memberikan ilmu, waktu, pemikiran dan bimbingan.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-undang No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

Undang-undang No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;

Undang-undang No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

Peraturan Menteri dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

- Peraturan Menteri dalam Negeri No. 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Akin, John., Paul Hutchinson, K Coleman Strumpf. 2005. Decentralisation and Government Provision of Public Goods: The public Health Sector in Uganda. *The Journal of Development Studies*, Vol.41, No.8, November 2005, ISSN : 0022-0388;
- Astri, Meylina., Sri Indah Nikensari, Harya Kuncara W. 2012. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Daerah Pada Sektor Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Ekonomi dan Bisnis* Vol.1 No.1 2012. ISSN: 2302-2663;
- Barankay, Iwan. dan Ben Lockwood. 2007. Decentralization and the productive efficiency of government: Evidence from Swiss cantons. *Journal of Public Economics* 91 (2007) 1197–1218. doi:10.1016/j.jpubeco.2006.11.006;
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Daerah. 2011. *Deskripsi dan Analisis APBD 2011*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia;
- Ding, Ying. 2007. Fiscal Decentralization and Economic Growth in China, 1994-2002. *Journal of Chinese Economic and Business Studies*, 5: 3, 243 — 260 DOI: 10.1080/14765280701656682;
- Dixon, Geoff. and Danya Hakim. 2009. Making Indonesia's Budget Decentralization Work : The Challenge of Linking Planning and Budgeting at The Local Level. *The Many Faces of Public Management Reform in the Asia-Pacific Region, Research in Public Policy Analysis and Management*, Volume 18, 207-245 ISSN: 0732-1317/doi:10.1108/S0732-1317(2009)0000018011;
- Faguet, Jean Paul. 2002. Does decentralization increase government responsiveness to local needs? Evidence from Bolivia. *Journal of Public Economics* 88 (2004). doi:10.1016/S0047-2727(02)00185-8
- Gujarati, Damodar N. 2007. *Dasar-dasar Ekonometrika Edisi Ketiga Jilid I*. Jakarta: Penerbit Erlangga;
- Kuncoro, Mudrajat. 2011. *Metode Kuantitatif Teori dan Aplikasi untuk Bisnis dan Ekonomi*. Yogyakarta: UPP-STIMYKPN.
- Mangkoesoebroto, Guritno. 1993. *Ekonomi Publik Edisi Ketiga*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta;
- Maski, Ghazali.dkk. 2010. *Pedoman Penulisan Skripsi, Laporan KKN-P, Artikel dan Makalah*. Malang: Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya;
- Prasetyo, Bambang dan Lina Miftahul Jannah. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Kharisma Putra Utama;
- Sunyoto, Danang. 2012. *Model Analisis Jalur untuk Riset Ekonomi*. Bandung. Yrama Widya;
- Shin, Roy. 2001. Strategies for Economic Development Under Decentralisation : A Transformation of The Political Economy. *International Journal of Public Administration*, 24: 10, 1083 —1102 DOI: 10.1081/PAD-100105103;
- Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan. 2012. *Modul diklat Ujian Dinas Tingkat I*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia;
- Terry, G.R. 2011. Principle of Management. <http://dholmind.blogspot.com> diakses tanggal 15 Juli 2013
- Thornton, John. 2006. Fiscal Decentralization and Economic Growth Reconsidered. *Journal of Urban Economics* 61 (2007) 64–70. DOI:10.1016/j.jue.2006.06.001;

- Utama, Sampurna Budi. 2009. *Menengok Kembali Isu Efisiensi Dalam Praktik Desentralisasi Fiskal*.
- Widarjono, Agus. 2010. *Analisis Statistika Multivariat Terapan*. Cetakan Pertama. Yogyakarta. UPP STIM YKPN-Yogyakarta;
- Badan Pusat Statistik. 2011. Jumlah Penduduk 2010. <http://sp2010.bps.go.id/> diakses pada 22 Juli 2013
- Badan Pusat Statistik. 2012. Tabel Data Pendapatan Daerah Jawa Barat. <http://www.bps.go.id/> diakses pada 16 Juli 2013
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat. 2012. PDRB Jawa Barat ADHB. <http://jabar.bps.go.id/subyek/> diakses pada 13 Juli 2013
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat. 2012. Pendapatan Regional. <http://jabar.bps.go.id/> data diakses pada 18 Juli 2013
- Badan Pengelola Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat. 2011. Kondisi Lingkungan Hidup di Wilayah Jawa Barat. <http://www.bplhdjabar.go.id/> diakses pada 10 Juli 2013
- Direktorat Jenderal Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri. 2011. Data PAD. <http://djkd.kemendagri.go.id/> diakses pada 10 Juli 2013
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan. 2011. Data Keuangan Daerah setelah TA 2006. <http://www.djpk.depkeu.go.id/> diakses pada 18 Juli 2013
- Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Provinsi Jogjakarta. 2012. Kode Rekening APBD. <http://dppka.jogjaprov.go.id/> diakses pada 13 Juli 2013